

**KLAUSUL EKSONERASI DALAM KLAUSUL BAKU**  
**Studi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor**  
**Di Soloraya**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1**  
**pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**SERLY SURYA MIRANDA**

**C100160238**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KLAUSUL EKSONERASI DALAM KLAUSUL BAKU**  
**Studi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor**  
**Di Soloraya**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SERLY SURYA MIRANDA**

**C100160238**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**( Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H. )**

## HALAMAN PENGESAHAN

### KLAUSUL EKSONERASI DALAM KLAUSUL BAKU Studi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Soloraya

OLEH  
SERLY SURYA MIRANDA  
C 100 160 238

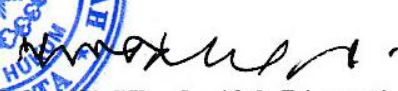
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 31 Januari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

#### Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H. (.....)  
(Sekretaris Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H. (.....)  
(Anggota Dewan Penguji)



Dekan,

  
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2020

Penulis



**SERLY SURYA MIRANDA**

**C100160238**

# **KLAUSUL EKSONERASI DALAM KLAUSUL BAKU**

## **Studi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

### **Di Soloraya**

#### **Abstrak**

Perkembangan zaman menjadi salah satu seseorang dapat melakukan perjanjian yang semakin mengalami perkembangan. Bentuk-bentuk perjanjian yang semula hanya dilakukan dalam bentuk tulisan, sekarang mengalami perkembangan karena adanya sistem perjanjian baku. Pada umumnya beberapa perusahaan sudah menerapkan adanya perjanjian baku. Dari adanya perjanjian baku tersebut didalamnya terdapat klausul eksonerasi yang artinya terdapat salah satu pihak yaitu pihak konsumen yang tidak dapat dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar ketika melakukan transaksi. Dalam hal ini dapat dikatakan adanya perjanjian baku tersebut menimbulkan adanya klausul eksonerasi yang pada dasarnya dapat menghilangkan adanya asas kebebasan dan keadilan yang dilakukan di masing-masing pihak dalam melakukan sebuah perjanjian. Sehingga dapat dinilai bahwa adanya klausula eksonerasi tersebut tidak memberikan keabsahan dalam melakukan perjanjian termasuk dalam keadilan di antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen.

**Kata Kunci:** perjanjian baku, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen

#### **Abstract**

The times are one of the people who can make agreements that are increasingly developing. Forms of agreement that were originally only done in written form, are now experiencing developments due to the existence of a standard agreement system. In general, several companies have implemented standard agreements. From the existence of the standard agreement there is an exoneration clause which means that there is one party, namely the consumer who cannot and does not have the opportunity to negotiate or bargain when making a transaction. In this case, it can be said that the existence of a standard agreement creates an exoneration clause which basically can eliminate the principle of freedom and justice carried out by each party in entering into an agreement. So it can be judged that the exoneration clause does not provide validity in entering into an agreement including in justice between the business actor and the consumer.

**Keywords:** standard agreement, the clause exoneration, consumer protection

## **1. PENDAHULUAN**

Pada umumnya perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (Harahap, 1986).

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan

bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka bentuk perjanjian yang digunakan para pihak juga telah banyak mengalami perubahan. Jaminan kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata seolah-olah sudah semakin terkikis dengan adanya perjanjian baku yang dibuat oleh para pihak yang memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat dan lebih dominan.

Umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi khususnya yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen sama sekali tidak menunjukkan posisi yang seimbang antara pelaku usaha (lembaga pembiayaan) sehingga cenderung menimbulkan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

## **2. METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain ((Harahap, 1986). Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang profil klausul eksonerasi dalam bentuk klausul baku dan perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat klausul eksonerasi dalam bentuk klausul baku yang terdapat pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Soloraya.

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Analisis data secara deduktif ialah suatu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Kemudian menganalisis data secara kualitatif meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literature lainnya berkaitan dengan perjanjian pembiayaan. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, selanjutnya disusun sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait dengan klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan mobil dan motor.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pembebasan Sama Sekali Tanggung Jawab yang Harus di Pikul Oleh Pihaknya Apabila Ada Ingkar Janji /atau Wanprestasi.**

Dalam pasal 1460 KUHPdata dijelaskan mengenai penanggungan dan risiko. Pasal 1460 KUHPdata menjelaskan bahwa “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”.

Untuk itu di dalam pasal tersebut sangatlah jelas bahwa dalam pembelian suatu barang yang sudah dijanjikan sebelumnya merupakan sepenuhnya tanggungan dari seorang pembeli apabila barang tersebut sudah di beli dari penjual tersebut. Meskipun barang yang dibeli tersebut belum diserahkan ataupun sudah diserahkan oleh pembeli.

Sedangkan didalam perjanjian pembiayaan DIPO STAR FINANCE terdapat beberapa pasal yang menjelaskan di antaranya :

Pasal 3 ayat 1 bahwa “Pilihan atas Barang dan Pemasoknya ditetapkan dan/atau disetujui DEBITUR sendiri, oleh karena itu resiko atas tidak sempurnanya mutu atau fungsi Barang begitu pula resiko atas kesalahan atau kelalaian Pemasok menjadi tanggungan DEBITUR sendiri, dan resiko demikian sekali-kali tidak boleh dan tidak akan merupakan alasan untuk meniadakan, mengurangi, atau menanggguhkan pelaksanaan penuh dan tepat tiap kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini”.

Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwa dalam norma dijelaskan bahwa apabila dalam perjanjian yang dilakukan merupakan sebuah atau sesuatu barang yang sebelumnya sudah di tentukan oleh penjual dan pembeli, maka pembeli sudah mempunyai tanggungan terhadap barang tersebut sejak pembeli telah melakukan pembelian terhadap penjual baik sudah dilakukan penyerahan ataupun belum diserahkan barang tersebut terhadap pembeli. Selain itu penjual barang mempunyai hak untuk menuntut harga dari barang tersebut. Sedangkan dalam isi perjanjian dijelaskan di dalam pasal 3 ayat 1 bahwa kreditur menunjukkan adanya pelepasan tanggung jawab atas kondisi barang baik dalam fungsi barang atau bentuk kelalaian lain merupakan resiko dan membebaskan seluruh tanggung jawab kepada debitur.

Untuk itu isi perjanjian yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 DIPO STAR FINANCE dengan ketentuan yang ada di dalam norma sudah sesuai, untuk itu bentuk isi

perjanjian tersebut bukan merupakan bentuk klausul eksonerasi karena dalam pasal isi perjanjian tersebut telah dijelaskan bahwa adanya pelepasan tanggung jawab dan tanggungan yang dilakukan oleh kreditur akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh debitur sendiri, sehingga resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab yang ditanggung oleh debitur atau pembeli.

Dalam Pasal 8 ayat 4 DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa “Apabila DEBITUR lalai atau tidak mengasuransikan barang tersebut, maka segala kerugian, kerusakan maupun tuntutan-tuntutan yang ditimbulkan karenanya akan sepenuhnya menjadi tanggungan DEBITUR”.

Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwa apabila dalam perjanjian yang dilakukan merupakan sebuah atau sesuatu barang yang sebelumnya sudah di tentukan oleh penjual dan pembeli, maka pembeli sudah mempunyai tanggungan terhadap barang tersebut sejak pembeli telah melakukan pembelian terhadap penjual baik sudah dilakukan penyerahan ataupun belum diserahkan barang tersebut terhadap pembeli. Selain itu penjual barang mempunyai hak untuk menuntut harga dari barang tersebut. Sedangkan dalam pasal 8 ayat 4 DIPO STAR FINANCE dijelaskan apabila barang yang sudah di terima debitur mengalami kerugian, kerusakan dan apapun yang ditimbulkan karena adanya kelalaian dari debitur. Merupakan sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggung jawab debitur dan tanpa adanya campur tangan dari kreditur.

Untuk itu bentuk klausul eksonerasi yang terdapat di dalam isi perjanjian pasal 8 ayat 4 DIPO STAR FINANCE dengan ketentuan yang ada di dalam norma sudah sesuai. Sehingga pasal 8 ayat 4 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE tidak termasuk bentuk klausul eksonerasi karena dalam pasal isi perjanjian tersebut telah dijelaskan bahwa adanya pelepasan tanggung jawab dan tanggungan yang dilakukan oleh kreditur akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh debitur sendiri, sehingga resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab yang ditanggung oleh debitur.

Terkait adanya kewajiban kreditur atau pelaku usaha dijelaskan di dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan terkait kewajiban pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha adalah : (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta



tidak diskriminatif. (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pasal 9 ayat 4 DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa “Ketidak sempurnaan dalam transaksi pembelian Barang dengan segala akibatnya, termasuk kejadian dimana barang terlibat dalam sengketa hukum atau menjadi gagal dikuasai oleh DEBITUR, adalah sepenuhnya menjadi resiko DEBITUR sendiri dan dalam hal terjadi demikian DEBITUR akan tetap melunasi Utang dan Kewajiban-kewajiban keuangan lain kepada KREDITUR”.

Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwa kreditur atau pelaku usaha mempunyai beberapa kewajiban dijelaskan di dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Hukum dan mencantumkan beberapa kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah seorang pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar sesuai dengan apa yang ada terhadap konsumen, berkata jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap konsumen, pelaku usaha harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, pelaku usaha harus memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan terhadap konsumen, pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan dijelaskan dalam pasal 9 ayat 4 DIPO STAR FINANCE bahwa apabila debitur mengalami transaksi yang tidak sesuai atas

pembelian barang termasuk adanya sengketa hukum yang terjadi atas barang merupakan tanggungjawab sepenuhnya oleh debitur sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak kreditur. Dari adanya sesuatu hal tersebut debitur juga tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi utang terhadap kreditur.

Untuk itu bentuk klausul eksonerasi yang terdapat di dalam isi perjanjian pasal 9 ayat 4 DIPO STAR FINANCE dengan ketentuan yang ada di dalam norma tidak sesuai, sehingga dalam pasal 9 ayat 4 DIO STAR FINANCE termasuk bentuk klausul eksonerasi. Karena dalam pasal isi perjanjian tersebut telah dijelaskan bahwa adanya pelepasan tanggung jawab dan tanggungan yang dilakukan oleh kreditur dan dilimpahkan sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab debitur karena adanya ketidak sempurnaan dalam transaksi pembelian barang dan terjadinya sengketa hukum. Sedangkan di dalam norma dijelaskan bahwa kreditur atau pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

### **3.2 Pembatasan Jumlah Ganti Rugi yang Dapat di Tuntut**

Dalam pasal 1243 KUH Perdata dijelaskan mengenai pembatasan ganti kerugian. Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa “ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Sedangkan di dalam Pasal 12 DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa “Atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dan kewajiban keuangan lainnya menurut Perjanjian ini, maka untuk tiap hari kelalaian itu DEBITUR harus membayar denda atas keterlambatan tersebut”.

Perbandingan antara norma dan isi perjanjian dalam pasal 12 DIPO STAR FINANCE adalah di dalam norma dijelaskan bahwa seorang debitur yang berutang dan tidak dapat memenuhi perjanjiannya untuk melunasi utangnya terhadap kreditur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati oleh masing-masing pihak berhak dan diwajibkan untuk mengganti biaya rugi dan bunga terhadap kreditur karena seorang debitur sudah dinyatakan lalai dalam melakukan suatu perikatan atau perjanjian. Sedangkan di dalam isi perjanjian tepatnya di dalam pasal 12 DIPO STAR FINANC dijelaskan bahwa debitur mempunyai kewajiban untuk membayar denda tiap hari

sementak debitur melakukan keterlambatan pembayaran terhadap kreditur karena adanya kelalaian yang dilakukan dengan tidak membayar angsuran dan kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Untuk itu klausul eksonerasi yang terdapat di dalam pasal 12 DIPO STAR FINANCE dengan ketentuan yang terdapat di dalam norma adalah dapat dikatakan sudah sesuai. Sehingga didalam isi perjanjian yang terdapat di dalam pasal 12 DIPO STAR FINANCE tidak termasuk bentuk klausul eksonerasi. Karena dijelaskan bahwa debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi dan membayar ganti rugi terhadap kreditur sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakat akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran.

### **3.3 Pembatasan Waktu Bagi Orang yang Dirugikan Untuk Dapat Mengajukan Gugatan/ Ganti Rugi (Dalam Hal Batas Waktu Lebih Pendek Dari Batas Waktu Yang di Tentukan Undang-Undang)**

Dalam pasal 27 Undang–Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa “Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila : (1) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. (2) Cacat barang timbul pada kemudian hari. (3) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. (4) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. (6) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli.

Dalam Pasal 7 ayat 5 DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa “Jika hak KREDITUR atas barang berdasarkan jaminan fidusia digugat, dilanggar atau dibahayakan atau barang disita atas permohonan orang lain, sebagai akibat dari suatu yang dilakukan oleh DEBITUR atau bukan, maka DEBITUR wajib untuk menolak tindakan itu serta langsung memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada KREDITUR dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dan menanggung segala biaya KREDITUR untuk menolak gugatan, sitaan atau bahaya tersebut”.

Perbandingan antara norma dan isi perjanjian dalam pasal 7 ayat 5 DIPO STAR FINANCE adalah pelaku usaha tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung beberapa ketentuan tersebut apabila terjadi terhadap konsumen, diantaranya adalah konsumen mengedarkan barang pada saat perjanjian dilakukan, cacatnya barang serta cacat timbul yang diakibatkan ditaatinya ketentuan dalam pengklasifikasi barang, konsumen

melakukan kelalaian yang diakibatkan dirinya sendiri dalam melakukan perjanjian, lewatnya jangka waktu dalam melakukan perjanjian, adanya niatan dari konsumen untuk mengedarkan barang, cacatnya barang serta cacat timbul yang diakibatkan ditaatinya ketentuan dalam pengklasifikasian barang, serta telah lewatnya jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikan atau telah lewatnya jangka waktu penuntutan selama 4 (empat) tahun sejak barang tersebut dibeli oleh konsumen. Sedangkan didalam pasal 7 ayat 5 DIPO STAR FINANCE menjelaskan bahwa Pasal tersebut menjelaskan bahwa debitur berkewajiban untuk menanggung segala biaya kreditur apabila adanya gugatan, pelanggaran dan hal yang membahayakan atas barang yang disita oleh permohonan orang lain. Serta menolak tindakan tersebut dan memberitahukan secara tertulis terhadap kreditur dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Untuk itu isi perjanjian dalam pasal 7 ayat 5 DIPO STAR FINANCE dan aturan yang terdapat di dalam norma dapat dikatakan tidak sesuai. Sehingga termasuk dalam bentuk klausul eksnorsi. Karena dijelaskan didalam pasal bahwa debitur mempunyai kewajiban untuk menanggung akibat atas segala biaya kreditur apabila adanya gugatan, pelanggaran dan hal yang membahayakan atas barang yang disita oleh permohonan orang lain. Sedangkan di dalam norma dijelaskan bahwa pelaku usaha baru akan melepaskan tanggung jawabnya apabila kelalalian yang dibuat merupakan kelalaian dari debitur sendiri serta telah lewatnya jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikan atau telah lewatnya jangka waktu penuntutan selama 4 (empat) tahun sejak barang tersebut dibeli oleh konsumen.

Sedangkan didalam Pasal 11 ayat 6 DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa “Dalam hal barang telah dikuasai oleh KREDITUR, maka kepada DEBITUR masih diberikan kesempatan untuk memiliki atau menguasai kembali barang dengan cara melakukan pembayaran / pelunasan atas seluruh kewajiban utangnya baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo kepada KREDITUR dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari (termasuk kewajiban lainnya dan denda bila ada). Apabila dalam jangka waktu tersebut DEBITUR tidak melakukan pembayaran seluruh kewajiban diatas, maka KREDITUR sebagai penerima jaminan fidusia atas barang dapat menjual barang kepada pihak ketiga atau pihak manapun sesuai dengan harga pasar pada waktu itu dimana uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban DEBITUR yang masih tertunggak termasuk biaya-biaya penarikan barang yang timbul pada saat itu. Dan bila masih ada kekurangan,

KREDITUR akan tetap menagih kepada DEBITUR sampai seluruh kewajiban itu menjadi lunas”.

Perbandingan aturan yang terdapat didalam norma dan isi perjanjian pasal 11 ayat 6 Akt Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE adalah didalam norma dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung beberapa ketentuan tersebut apabila terjadi terhadap konsumen, diantaranya adalah konsumen mengedarkan barang pada saat perjanjian dilakukan, cacatnya barang serta cacat timbul yang diakibatkan ditaatinya ketentuan dalam pengklasifikasian barang, konsumen melakukan kelalaian yang diakibatkan dirinya sendiri dalam melakukan perjanjian, lewatnya jangka waktu dalam melakukan perjanjian, adanya niatan dari konsumen untuk mengedarkan barang, cacatnya barang serta cacat timbul yang diakibatkan ditaatinya ketentuan dalam pengklasifikasian barang, serta telah lewatnya jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikan atau telah lewatnya jangka waktu penuntutan selama 4 (empat) tahun sejak barang tersebut dibeli oleh konsumen. Sedangkan dalam pasal 11 ayat 6 DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa kreditur memberikan kesempatan terhadap debitur untuk melunasi pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari. Apabila dalam waktu tersebut debitur tidak mampu melunasi utangnya tersebut, maka barang tersebut akan dijual kreditur kepada pihak ketiga atau pihak manapun untuk melunasi kewajiban debitur termasuk biaya-biaya yang tertunggak dan yang belum dibayarkan terhadap kreditur.

Untuk itu antara aturan yang terdapat didalam norma dan isi perjanjian yang terdapat didalam pasal 11 ayat 6 DIPO STAR FINANCE dapat dikatakan tidak sesuai. Sehingga pasal 11 ayat 6 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE termasuk dalam bentuk klausul eksonerasi. Karena di dalam pasal dijelaskan bahwa kreditur akan melakukan tindakan dengan menjual barang yang diperjanjikan sebagai jaminan untuk melunasi utang dan segala biaya-biaya tanggungan lain terhadap kreditur sebagai bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitur.

### **3.4 Bentuk Dimana Kewajiban-Kewajiban Dicipta, Salah Satu Pihak Dibebankan Dengan Kewajiban Untuk Memikul Tanggung Jawab Pihak Lain Yang Mungkin Ada Untuk Kerugian Yang Diderita Oleh Pihak Ketiga.**

Dalam pasal Undang – Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Penjaminan Fidusia memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban penerima dan pemberi fidusia. Beberapa penjelasan tersebut adalah :

Kewajiban Penerima Fidusia diantaranya adaah: (1) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor Pendaftaran Fidusia. (2) Wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. (3)Wajib mengembalikan kepada pemberi fidusia dalam hal hasl eksekusi mlebihi nilai penjaminan. (4) Wajib memberitahukan kepada Kantor Pendaftara Fidusia.

Kewajiban Pemberi Fidusia diantaranya adalah : (1) Dalam hal pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, wajib menggantinya dengan obyek yang setara. (2)Wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. (3) Tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

Hak Penerima Fidusia diantaranya adalah : (1) Kepemilikan atas benda yang dijadikan obyek fidusia, namun secra fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaanya. (2) Dalam hal debitur wanpestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat adanya titel eksekutorial, sehingg mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. (4) Memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. (5)Tetap berhak atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur.

Hak pemberi fidusia diantaranya adalah : (1)Tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. (2) Dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas utang apabila penerima fidusia menyetujui.

Dalam pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE yang menjelaskan terkait kewajiban pemberi fidusia dijelaskan ”Bahwa berdasarkan perjanjian fidusia tersebut diatas, kreditur dengan ini memiliki hak untuk menerima dokumen jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada Bukti Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dari debitur dan/atau pemasok, dan debitur dan/atau pemasok berkewajiban untuk menyerahkan dokumen jaminan tersebut. Kreditur berkewajibaniuu untuk mengembalikan dokumen jaminan kepada debitur atas kuasanya yang sah dalam hal debitur telah melunasi utang dan

Perbandingan antara norma dengan isi perjanjian yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE adalah bahwa di dalam norma dijelaskan dalam hal pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menggantinya dengan obyek yang setara, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi dan tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan. Sedangkan di dalam pasal atau isi perjanjian yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa kreditur mempunyai hak untuk menerima dokumen yang merupakan jaminan dari seorang debitur dalam melakukan perjanjiannya. Dalam penyerahan dokumen tersebut seorang debitur diwajibkan untuk menyerahkan dokumen jaminannya terhadap kreditur. Setelah adanya pelunasan utang dan kewajiban lainnya yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur maka dokumen yang merupakan jaminan tersebut diserahkan kembali terhadap debitur.

Untuk itu aturan yang terdapat di dalam norma dan isi perjanjian yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE telah sesuai. Sehingga pasal 7 ayat 3 tersebut tidak termasuk dalam bentuk klausul eksensorasi. Karena antara norma dengan pasal yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 tersebut telah jelas bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan kembali jaminan fidusia terhadap debitur apabila debitur telah melakukan pelunasan.

Sedangkan di dalam pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE juga dijelaskan terkait adanya hak pemberi fidusia yaitu “Bahwa berdasarkan perjanjian fidusia tersebut diatas, kreditur dengan ini memiliki hak untuk menerima dokumen jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada Bukti Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dari debitur dan/atau pemasok, dan debitur dan/atau pemasok berkewajiban untuk menyerahkan dokumen jaminan tersebut. Kreditur berkewajiban untuk mengembalikan dokumen jaminan kepada debitur atas kuasanya yang sah dalam hal debitur telah melunasi utang dan kewajiban pembayaran lainnya kepada kreditur”.

Perbandingan antara norma dengan isi perjanjian yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE adalah bahwa di dalam norma pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, atau melakukan penagihan atau

melakukan kompromi atas utang apabila penerima fidusia menyetujui. Sedangkan di dalam pasal atau isi perjanjian yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa kreditur mempunyai hak untuk menerima dokumen yang merupakan jaminan dari seorang debitur dalam melakukan perjanjiannya. Dalam penyerahan dokumen tersebut seorang debitur diwajibkan untuk menyerahkan dokumen jaminannya terhadap kreditur. Setelah adanya pelunasan utang dan kewajiban lainnya yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur maka dokumen yang merupakan jaminan tersebut diserahkan kembali terhadap debitur.

Untuk itu aturan yang terdapat di dalam norma dan isi perjanjian yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE telah sesuai. Sehingga pasal 7 ayat 3 tersebut tidak termasuk dalam bentuk klausul eksensorasi. Karena antara norma dengan pasal yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE tersebut telah jelas bahwa pemberi fidusia mempunyai hak untuk menerima dokumen yang merupakan jaminan dari seorang debitur dalam melakukan perjanjiannya.

Dalam pasal 4 dan 5 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan terkait adanya hak dan kewajiban konsumen. Dalam pasal 4 Undang –Undang Perlindungan Konsumen tersebut dijelaskan bahwa :

Hak Konsumen adalah : (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (10) Dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan terkait kewajiban konsumen.



Kewajiban konsumen adalah : (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE dijelaskan adanya hak konsumen bahwa “Fasilitas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur akan membiayai sendiri (self-financing) dalam bentuk uang muka sebesar tersebut pada perjanjian ini dari jumlah harga barang pembiayaan”.

Perbandingan aturan yang terdapat didalam norma dan isi perjanjian pasal 1 ayat 2 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE adalah norma menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak dalam melakukan sebuah perjanjian di antaranya hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperjanjikan, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjanjikan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan di dalam pasal 1 ayat 2 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas berupa barang yang diperjanjikan setelah debitur melakukan pembayaran barang tersebut dengan bentuk uang muka sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh kreditur.

Untuk itu antara aturan yang terdapat didalam norma dan isi perjanjian yang terdapat didalam pasal 1 ayat 2 DIPO STAR FINANCE dapat dikatakan sudah sesuai. Sehingga tidak termasuk dalam bentuk klausul eksonerasi. Karena didalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa konsumen atau debitur berhak untuk mendapatkan fasilitas barang yang diperjanjikan setelah adanya pembayaran uang muka sesuai dengan perjanjian sehingga

sesuai dengan hak konsumen yang dijelaskan didalam norma bahwa konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Dalam Pasal 6 ayat 1 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE dijelaskan mengenai kewajiban konsumen bahwa “Pembayaran kembali utang dilakukan secara mengangsur dengan jadwal dan jumlah angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian ini”.

Perbandingan antara aturan yang terdapat di dalam norma dan pasal 6 ayat 1 Akta Perjanjian DIPO STAR FINANCE adalah di dalam norma dijelaskan bahwa konsumen mempunyai beberapa kewajiban yang dilakukan dalam sebuah perjanjian di antaranya adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sedangkan di dalam pasal 6 ayat 1 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FIANANCE dijelaskan bahwa seorang debitur diwajibkan untuk membayar utang atau pembayaran atas barang yang sudah diperjanjikan secara berangsur dan sesuai dengan jadwal yang dipejanjikan sebelumnya serta dengan jumlah yang disepakati antara debitur dan kreditur dalam melakukan perjanjian.

Untuk itu antara aturan yang terdapat didalam norma dan isi perjanjian yang terdapat didalam pasal 6 ayat 1 DIPO STAR FINANCE dapat dikatakan sudah sesuai. Dan tidak termasuk dalam bentuk klausul eksonerasi. Karena didalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang atau pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang diperjanjikan terhadap kreditur. Sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan kewajiban konsumen yang dijelaskan di dalam norma bahwa konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Dalam Pasal 6 ayat 3 Akta Perjanjian Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE juga dijelaskan terkait kewajiban konsumen bahwa “Seluruh utang debitur, begitu pula pembayaran kewajiban keuangan lain berdasarkan perjanjian ini, harus dilunasi oleh debitur kepada kreditur pada tanggal jauh tempo angsuran terakhir yang ditetapkan dalam perjanjian ini”.

Perbandingan antara aturan yang terdapat didalam norma dan pasal 6 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE adalah didalam norma dijelaskan bahwa konsumen mempunyai beberapa kewajiban yang dilakukan dalam sebuah perjanjian di antaranya adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sedangkan di dalam Pasal 6 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE dijelaskan bahwa seorang debitur mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utangnya terhadap kreditur begitupun juga dengan keuangan lain yang wajib untuk dilunasi sesuai dengan waktu yang ditentukan didalam perjanjian dan sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur.

Unuk itu antara aturan norma yang berlaku dan pasal 6 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE dapat dikatakan sudah sesuai. Sehingga tidak termasuk dalam bentuk klausul eksonrasi. Karena di dalam pasal 6 ayat 3 dijelaskan bahwa seorang debitur mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utangnya terhadap kreditur begitupun juga dengan keuangan lain yang wajib untuk dilunasi sesuai dengan waktu yang ditentukan didalam perjanjian. Sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan norma yang menjelaskan terkait kewajiban konsumen bahwa konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Dalam Pasal 6 ayat 4 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE mengenai kewajiban konsumen yang dijelaskan bahwa “ Debitur akan melaksanakan pembayaran utang dan pembayaran-pembayaran berdasarkan pasal ini dialamat kantor kreditur tersebut dimuka atau pada alamat lain yang ditentukan secara tegas oleh kreditur”.

Perbandingan antara aturan yang terdapat didalam norma dan di dala pasal 6 ayat 4 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE adalah di dalam norma dijelaskan bahwa bahwa konsumen mempunyai beberapa kewajiban yang dilakukan dalam sebuah perjanjian di antaranya adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum

sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sedangkan di dalam pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa dalam melakukan pembayaran uang dan pembayaran-pembyaran lain yang di lakukan oleh debitur, debitur harus melakukan pembayaran dialamat kantor kreditur atau alamat lain yang sesuai atau berdasarkan dengan alamat yang ditentukan secara tegas oleh kreditur didalam perjanjian yang dilakukan.

Untuk itu berdasarkan aturan yang terdapat di dalam norma dan pasal 6 ayat 3 Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE dapat dikatakan telah sesuai. Sehingga tidak termasuk dalam bentuk klausul eksonerasi. Karena didalam pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa dalam melakukan pembayaran uang dan pembayaran-pembyaran lain yang di lakukan oleh debitur, debitur harus melakukan pembayaran dialamat kantor kreditur atau alamat lain yang sesuai atau berdasarkan dengan alamat yang ditentukan. Sehingga sudah sesuai dengan salah satu kewajiban konsumen yang dijelaskan di dalam norma yaitu berikikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

#### **4. PENUTUP**

Isi perjanjian yang terdapat di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE tepatnya di dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 ayat 4 telah sesuai dan tidak termasuk dalam betuk klausul ekonerasi pembebasan sama sekali tanggung jawab yang harus di pikul oleh pihaknya apabila ada ingkar janji /atau wanprestasi karena tidak bertentangan dengan pasal 1460 KUHPerdata. Pasal 9 ayat 4 Akta Perjnjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE merupakan bentuk klauusl eksonerasi pembebasan sama sekali tanggung jawab yang harus di pikul oleh pihaknya apabila ada ingkar janji /atau wanprestasi karena bertentangan engan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Isi perjanjian yang terdapat di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE tepatnya di dalam pasal 12 telah sesuai dan tidak termasuk dalam bentuk klausul eksonerasi pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat di tuntutan karena tidak bertentangan dengan pasal 1243 KUH Perdata.

Isi perjanjian yang terdapat di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE tepatnya di dalam Pasal 7 ayat 5, Pasal 11 ayat 6 tidak sesuai dan merupakan bentuk klausul eksonerasi Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan/ ganti rugi (Dalam Hal Batas Waktu Lebih Pendek Dari Batas Waktu Yang di Tentukan Undang-Undang) karena bertentangan dengan pasal 27 Undang–Undang Perlindungan Konsumen.

Isi perjanjian yang terdapat di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE tepatnya di dalam Pasal 7 ayat 3 mengenai hak pelaku usaha atau sebagai pemberi fidusia telah sesuai dan tidak termasuk dalam bentuk klausul ekonerasi karena tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Penjaminan Fidusia

Isi perjanjian yang terdapat di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE tepatnya di dalam Pasal 7 ayat 3 mengenai kewajiban pelaku usaha atau sebagai pemberi fidusia telah sesuai dan tidak termasuk dalam bentuk klausul eksonerasi karena tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Penjaminan Fidusia.

Isi perjanjian yang terdapat di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE tepatnya di dalam Pasal 1 ayat 2 mengenai hak pembeli atau debitur telah sesuai dan tidak merupakan bentuk klausul ekonerasi karena tidak bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Isi perjanjian yang terdapat di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan DIPO STAR FINANCE tepatnya di dalam Pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 3, Pasal 6 ayat 4 mengenai kewajiban pembeli atau debitur telah sesuai dan tidak merupakan bentuk klausul eksonerasi karena tidak bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin & Asiki, Zaenal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Harahap, M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni
- Harahap, M. Yahya. (2004). *Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan , penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: sinar grafika
- Ibrahim, Johny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Muliadi, Ahmad. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Kademina
- Salim H.S., S.H., M.S. (2009). *Hukum Kontrak teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

- Sukandar,Dadang. (2012). *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta :Sinar Grafika
- Suratman H. & Dullah, Philips. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta
- Wardiono, Kelik. (2014). *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Sebuah Deskripsi tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta:Ombak

## **JURNAL**

- Evalina Yessica. (2014). “ Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi”, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume 1
- Miko Santoso Ginting. (2014). “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian”, Jurnal hukum dan Peradilan, Nomor 3 Volume 3
- Muhammad Hasan Muazizi. (2015). ”Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, Jurnal Law Reform, Nomor 1 Volume 11
- Muhammad Marafwansyah. (2018). “Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pda Perusahaan Pembiayaan DiKota Banda Aceh”, Vol. 20, No.2
- Setianto Trimulyo. (2017). “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus di PT.Oto Multiartha Cabang Mataram)”, Jurnal IUS, Nomor 1 Vol V
- Yuda Sebastian. (2016) “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT.ACC Finance Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum, Vol. III No. 2

## **PERATURAN HUKUM**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen